

STRATEGI PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MANADO TAHUN 2016 DI DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA MANADO

Sahrudin Tukuboya¹

Michael Mamentu²

Johny Lengkong³

Abstrak

Pemilihan Kepala Daerah merupakan ajang bagi partai politik dalam bersaing memperebutkan kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di tingkat provinsi, Kota dan kabupaten. Untuk itu Partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Seperti halnya Partai Demokrat Kota Manado yang berhasil meraih suara mayoritas dengan total perolehan suara sebanyak 67.081 pada pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Manado yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado. Penggalan data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kota Manado yakni Nortje H. Van Bone. Kemenangan tersebut tentu tidak terlepas dari penggunaan strategi yang baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah: mengetahui bagaimana strategi Partai Demokrat Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat Kota Manado Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Strategi tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kampanye, dan pencitraan meliputi figur dan citra partai.

Kata Kunci : Strategi, Partai Demokrat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu event politik yang pada tahun 2015 diadakan serentak di seluruh di Indonesia. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada gelombang pertama ini diikuti oleh sembilan provinsi, 36 kota dan 224 kabupaten. Salah satu daerah yang mengikuti atau menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu Kota Manado namun karena dalam evaluasi pelaksanaannya, Pilkada serentak 9 Desember 2015 di kota manado masih terdapat permasalahan seperti ancaman konflik kekerasan dan logistik yang belum sampai di tempat pemungutan suara (TPS) maka, di mundurkan sampai pada tanggal 17 februari 2016.

Sebagai ibukota dari Provinsi Sulawesi Utara, tentunya pilkada manado menarik untuk diteliti karena keadaan masyarakatnya yang heterogen, sehingga akan menimbulkan berbagai persepsi dan cara pandang yang berbeda di kalangan masyarakat. Pada pemilihan walikota dan wakil walikota tersebut diikuti oleh 3 pasangan calon yakni Harley Mangindaa dan Jemmy Asiku sebagai kandidat nomor urut 1, G. S Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan sebagai kandidat nomor urut 3, dan Hanny Joost dan Gregorius Tony Rawung sebagai kandidat nomor urut 4.

Salah satu hal yang menarik untuk diteliti adalah kemenangan kembali G. S Vicky Lumentut sebagai walikota incumbent (petahana) dan wakilnya Mor Domunis Bastiaan yang di usung oleh Partai Demokrat pada pemilihan Walikota-Wakil Walikota Manado tahun 2016. Dengan bermodalkan kemenangan Legislatif di kota manado pada pemilu 2014 dan citra positif G. S. Vicky Lumentut sebagai incumbent (patahana) membuat Partai Demokrat Kota Manado memberanikan diri untuk

tampil sebagai single fighter atau dengan kata lain tanpa berkualitas dengan partai manapun, sedangkan kedua pasangan calon lainnya yakni Harley Mangindaan-Jemmy Asiku di dukung oleh Partai Gerindra dan Hanura serta Hanny Joost Pajouw dan Gregorius Tony Rawung di dukung Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasional Demokrat pada pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun 2016.

Kemenangan yang diraih partai demokrat Kota Manado pada pemilihan walikota dan wakil walikota manado tersebut tentu tidak lepas dari ketepatan dalam menggunakan strategi oleh partai dan team pemenang pasangan calon G.S. Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan, dalam penggunaan strategi pasti terdapat kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) atau yang dikenal dengan analisis SWOT. Di dalam konteks penelitian ini, analisis SWOT akan dikaitkan dengan penerapan strategi Partai Demokrat Kota Manado dalam memenagkan pasangan calon G. S. Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado tahun 2016.

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan sejak penetapan calon walikota dan wakil walikota Manado oleh KPUD Kota Manado pada tahun 2015, dari segi kekuatan (strengths), Partai Demokrat Kota Manado memiliki kekuatan yang terdiri dari beberapa faktor yakni sebagai partai pemenang pemilihan Legislatif Kota Manado tahun 2014, partai pemenang pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun 2010, kekuatan sumber keuangan pasangan calon yang di usung, citra pasangan calon yang

positif, keunggulan kedudukan di masyarakat dan kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan. Sebagai partai pemenang pemilu legislatif di kota manado, Partai Demokrat merupakan satu-satunya partai yang memiliki Sembilan keterwakilan dari total empat puluh kursi di DPRD Kota Manado sehingga secara tidak langsung Partai demokrat telah memiliki kantong-kantong suara yang mengungguli partai lainnya.

Dari kekuatan sumber keuangan, pasangan calon yang di usung partai demokrat tentunya bisa dilihat bahwa kedua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki sumber pendanaan yang cukup kuat. Jika melihat latar belakang pekerjaan, G. S Vicky Lumentut sebagai Walikota petahana memiliki cukup dana untuk berkampanye, sedangkan Mor Dominus Bastiaan sendiri adalah seorang wakil ketua DPRD Kota Manado aktif sampai ia mencalonkan dirinya sebagai wakil walikota manado, tentunya juga memiliki sumber pendanaan yang cukup mumpuni.

Dari kekuatan citra yang positif, dapat dilihat dari beberapa program G. S Vicky Lumentut, yang berhasil menorehkan beberapa prestasi di antaranya adalah seperti penghargaan Adipura lima kali berturut-turut untuk kategori kota sedang dan satu kali untuk kategori kota besar, peringkat II nasional PIAK, tiga kali meraih penghargaan kota sehat, penghargaan Pakerti III untuk Lingkungan Bersih Sehat (LBS), juara I lomba desa/kelurahan tingkat provinsi yang diraih oleh kelurahan Kleak dan penghargaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Kehidupan yang rukun dan damai dalam semangat Torang Samua Basudara membuat kota Manado

dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event berskala nasional maupun internasional, antara lain ASEAN Tourism Forum (ATF), Pasific Partnership, Pekan Informasi Nasional (PIN), munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-IV, semiloka akselerasi Millenium Development Goals (MDGs), dan juga Munas PELTI. Hidup aman dan nyaman yang diformulasikan dalam misi “Menjadikan Manado kota yang menyenangkan” direspons oleh pemerintah pusat bahkan dunia internasional untuk menjadikan kota Manado sebagai salah satu kota tujuan wisata dan tempat investasi. Selain pemerintah pusat, respon lain juga datang dari luar negeri indonesia yakni Liverpool, liverpool adalah salah satu kota yang menjalin hubungan kerjasama dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan kota Manado. MoU yang ditandatangani pada tanggal 26 November 2012 menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, olah raga, kebudayaan dan perdagangan, maka dari itu citra positif G. S Vicky Lumentut dapat dikatakan baik, dengan berdasar pada penyelesaian masalah tersebut. Dari keunggulan kedudukan di masyarakat dan kepercayaan berbagai pihak yang berkepentingan, tentunya sudah ditunjukkan dengan kedudukan G. S Vicky Lumentut sebagai walikota petahana dari partai demokrat, dan hal tersebut sudah menjadi keunggulan kedudukan di masyarakat sebagai konstituen yang akan memilih pasangan calon yang di usung partai demokrat tersebut.

Berdasarkan kelemahannya (weakness), pasangan calon partai demokrat ini, tentunya memiliki kelemahan-kelemahan, namun yang terpenting adalah meminimalisir

kelemahan-kelemahan tersebut menjadi satu sisi yang menjadi kelebihan dari pasangan calon tersebut. Kelemahan tersebut dapat berupa kelemahan sarana dan prasarana, yang dalam hal ini, kelemahan tersebut ditunjukkan dengan minimnya alat peraga kampanye yang di pasang di tempat-tempat yang mudah dilihat, karena pemasangan tersebut, hanya boleh dilakukan dan yang menentukan adalah KPUD. Peluang (opportunities) yang merupakan kondisi lingkungan eksternal yang menguntungkan bahkan menjadi formulasi dalam proses kampanye. Situasi lingkungan tersebut seperti perubahan dalam keadaan persaingan. Jika melihat partai pengusung dari kedua pasangan calon ini, partai pengusung tersebut merupakan partai besar, sebab partai demokrat merupakan partai yang memiliki sembilan kursi keterwakilan di DPRD Kota Manado sehingga partai demokrat menjadi satu satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon tanpa koalisi dengan partai lain. sehingga memudahkan atau memberikan peluang kepada G. S Vicky Lumentut dan Mor D. Bastiaan untuk memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut. Kemudian dari segi ancaman (threat), ancaman dapat berupa faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pasangan calon ini. Jika sebuah ancaman tidak ditanggulangi, maka akan menjadi sebuah penghalang atau penghambat bagi pasangan calon ini, seperti misalnya keberadaan swing voters (ayunan pemilih). Apabila swing voters tidak diyakinkan oleh team pemenang partai dan pasangan calon untuk memilih G. S Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan, maka pasangan calon ini akan kehilangan suara dari swing voters. Di dalam kampanye, tentunya tidak terlepas dari berbagai

masalah. Seperti kesulitan yang dialami dalam proses kampanye saat ini adalah keterbatasan ruang gerak untuk sosialisasi melalui alat peraga kampanye seperti baliho, banner dan pamflet, yang hanya bisa dilakukan adalah membagikan kaos, kalender, stiker dan pin. Hal tersebut tentunya akan mengurangi sosialisasi dengan menggunakan metode alat peraga, di tambah lagi dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tersebut Partai Demokrat tampil dengan tanpa berkualifikasi dengan partai apapun. Tentunya ini menjadi sesuatu yang cukup sulit bagi partai demokrat kota dalam upaya memenangkan G. S Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan ditambah lagi dalam pilkada 2016 Vicky Lumentut di perhadapkan dengan rival politiknya yang jug merupakan wakil walikota petahana.

Tinjauan Pustaka

Partai berasal dari bahasa latin "Partire" yang bermakna membagi. Partai Politik (Parpol) merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini parpol bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan parpol baru ada di negara moderen (Efriza, 2012:209). Di dalam Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol) pasal 1 ayat (1), yang di namakan partai politik adalah "Organisasi yang bersifat nasional di bentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita cita untuk memperjuangkan dan

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945". Partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat. Menurut Crowe dan Mayo Partai politik adalah institusi yang mengaktifkan dan memobilisasi orang, kepentingan, menyediakan instrumen kompromi dari beragam pendapat, dan memfasilitasi munculnya seorang pemimpin (Efriza, 2012:214).

Menurut David E. Apter partai politik merupakan perantara tunggal terpenting untuk politik, daya saing, tawar menawar, dan negosiasi. Partai memungkinkan para politisi tetap dekat dengan publik di satu pihak dan menjadi sesuatu yang berlainan bagi sejumlah besar orang. Sebaliknya, ketika memperoleh jabatan, para politisi di harapkan mampu berdiri di atas berbagai kepentingan publik yang lebih umum. jelaslah bahwa sebagian politisi bertindak seperti itu dan sebagian yang lain tidak, semua itu merupakan bagian permainan partai (Efriza, 2012:214).

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini memberikan ruang partisipasi yang luas untuk memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah. Karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerah tersebut. Sejak pasca reformasi peraturan tentang

pemilihan kepala daerah secara langsung memang selalu diperbaiki atau diamandemen. Pada tanggal 15 Maret 2015 yang lalu disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan yang dimaksud dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut dengan pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Menurut Asshiddiqie (Wirdasari, 2015:25), menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah langsung merupakan mekanisme demokrasi dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Sebab, sebagai apapun suatu negara yang ditata secara demokratis, tidak akan dianggap benar-benar demokratis manakala pemimpin-pemimpinnya tidak dipilih secara bebas oleh rakyatnya sendiri. Pemilihan selalu dijadikan tolak ukur untuk menentukan sebuah negara demokratis atau tidak.

Demokrasi memang tidak semata-mata ditentukan oleh ada tidaknya pemilihan oleh rakyat atas pemimpin-pemimpinnya.

Lalu menurut Suharizal (Wirdasari, 2015:25-26), mengemukakan pemilihan kepala daerah merupakan perjalanan politik panjang yang diwarnai tarik menarik antara kepentingan elit politik dan kehendak politik, kepentingan nasional dan internasional. Mengingat esensi pilkada adalah pemilu, dimana secara prosedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik.

Prihatmoko (2005:34) juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, di mana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon bersaing dalam suatu medan permainan dengan aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan dengan berbagai tahapan kegiatan dan penunjang kegiatan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggung jawabkan (*accountabel*). Berdasarkan definisi pemilihan kepala daerah oleh beberapa ahli di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin yang akan melaksanakan urusan daerahnya sehingga hak dan kebebasan yang dimiliki oleh rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar

berkualitas dalam memimpin daerah tersebut.

Metode Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam Noor (2011:34), menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan informan, dan melakukan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan studi riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Di dalam Juliansyah Noor (2011: 34-35), dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Selain pengertian di atas, dalam Fathoni (2011:97), dijelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu. Di dalam hal ini, landasan teori mulai diperlukan tetapi bukan digunakan sebagai landasan untuk menentukan kriteria pengukuran terhadap gejala yang diamati dan akan diukur. Penelitian ini juga akan mendeskripsikan mengenai strategi pemenangan yang digunakan Partai Demokrat Kota Manado dalam memenangkan pasangan calon G. S.

Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016.

Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong,2002:6). Fokus penelitian ini sangat membantu penelitian kualitatif dalam membuat keputusan untuk membung atau menyimpan informasi yang diperolehnya. Berdasarkan konsep diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Strategi partai demokrat kota manado pada pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun 2016

Hasil Penelitian

Strategi penting dilakukan untuk memenangkan perolehan suara partai politik ataupun kandidat yang diusungnya. Penggunaan strategi juga digunakan Partai Demokrat guna mencapai tujuan yang diharapkan yaitu dapat memenangkan pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Manado. Kelahiran Partai Demokrat yang mengusung ideologi nasionalis-religius nampaknya disambut baik oleh masyarakat pemilih di Kota Manado. terbukti dengan capain dua kali berturut-turut memperoleh suara terbanyak pada pemilihan walikota dan wakil walikota manado yakni pada tahun 2010 dan pada pemilihan serentak walikota dan wakil walikota pada tahun 2016.

Karakteristik masyarakat Kota manado yang merupakan basis massa nasionalis religius seperti menemukan kembali kepercayaannya terhadap partai politik di dalam “tubuh” maupun “ruh”

perjuangan Partai Demokrat. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai lain, baik yang berhaluan nasionalis maupun agama, menjadi momentum yang berhasil dimanfaatkan Partai Demokrat untuk menjadi besar di Kota Manado. Seperti dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun 2016 Partai Demokrat melakukan “gebrakan” dengan berhasil kembali memenangkan G.S. Vicky Lumentut dan Mor Dominus Bastiaan sebagai walikota dan wakil walikota manado. Kemenangan ini bahkan menjadi fenomenal dikarenakan Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat kota manado dalam pemenangan Pilwako Manado tahun 2016 lebih mengacu pada strategi komunikasi dan pencitraan. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat pada pemilihan walikota tahun 2010, tetapi dengan penguatan di beberapa sektor, seperti lebih kuatnya citra Partai Demokrat yang lebih dikenal oleh masyarakat karena SBY selaku presiden pada tahun 2004 dan 2009 yang juga merupakan pimpinan partai sampai saat ini, birokrasi yang ada di pemerintahan seperti halnya di Kota Manado, dalam artian ketika pemimpinnnya berasal dari Partai tertentu kecenderungan bawahannya akan mengikuti, seperti halnya G. S. Vicky Lumentut yang merupakan Walikota Manado pada periode sebelumnya yakni pada tahun 2010 dan juga merupakan ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara.

Menurut Onong Uchjana Effendi (2004:5) dalam buku berjudul “Dinamika komunikasi” menyatakan bahwa komunikasi adalah proses

penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung melalui media. Sedangkan menurut Anwar Arifin (1984:10) dalam buku 'Strategi Komunikasi' menyatakan bahwa: "sesungguhnya suatu strategi adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi, berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna mencapai efektivitas. Dengan strategi komunikasi ini, berarti dapat ditempuh beberapa cara memakai komunikasi secara sadar untuk menciptakan perubahan pada diri khalayak dengan mudah dan cepat".

Strategi komunikasi bertujuan untuk menyampaikan program-program, ide-ide meliputi merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan, menciptakan kebersamaan (memahami khalayak, menyusun pesan persuasif, menetapkan metode, memilih dan memilih media), membangun konsensus (seni berkompromi, bersedia membuka diri). Artinya dengan ketokohan seorang politikus dan kemantapan lembaga politik dalam masyarakat, memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi (Firmansah, 2007: 256).

Sedangkan menurut Nursal Adman (2004: 236) berpendapat secara umum ada tujuh alat komunikasi produk politik kepada pasar: "Pertama, iklan adalah cara mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan produk-produk melalui media massa tertentu oleh kontestan tertentu dengan member bayaran kepada pihak media tersebut seperti iklan media elektronik, iklan

layar lebar, brosur dan lain-lain; kedua, direct marketing atau pemasaran langsung adalah penggunaan surat, telepon dan alat-alat kontak nonpersonal lainnya untuk berkomunikasi atau meminta respon kepada orang yang dihubungi mengenai gagasan atau produk politik tertentu. ketiga, special event adalah event khusus yang diadakan untuk mengumpulkan para pemilih atau pihak-pihak tertentu sebagai ajang untuk menyampaikan gagasan atau produk politik. keempat, personal contact atau kontak personal adalah interaksi tatap muka dengan orang-orang tertentu untuk menyampaikan gagasan atau produk politik seperti obrolan ramah-tamah, lobi politik, persentasi personal, pertemuan terbatas dan lain-lain kelima, public relation adalah berbagai program yang didesain untuk agar pasar (pemilih), media massa, dan influencer mempercayai produk politik sebuah kontestan dengan mengkomunikasikan informasi dan kesan yang kredibel, keenam, merchandise adalah barang pernak-pernik yang dapat dilatakkan dengan pesan-pesan politik dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu sebagai cinderamata seperti audio visual, kaset, baju kaos, topi, foto, pena, brosur, logo, dan sebagainya. ketujuh, pos politik adalah bangunan yang dapat dijadikan tempat pertemuan, baik pertemuan orang-orang di tingkat akar rumput maupun pertemuan antara orang-orang penting kontestan dengan orang di tingkat akar rumput.

Komunikasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh semua orang untuk menjalin hubungan, begitu juga dengan Partai Demokrat, dengan komunikasi dapat mendekatkan atau mengenalkan calon yang di usungnya maupun partai

kepada masyarakat dan juga sebagai alat penghubung secara langsung dengan masyarakat baik langsung maupun melalui media elektronik. Strategi komunikasi merupakan pendekatan yang dilakukan atau digunakan Partai Demokrat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2016 yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, dan kampanye.

Kota Manado sejak tahun 2010 telah dipimpin oleh G.S Vicky Lumentut sebagai Walikota. Pada awalnya Vicky Lumentut merupakan Birokrat yang dicalonkan oleh Partai Demokrat dan di lanjutkan pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015 namun karena terdapat sedikit masalah administrasi pemilihan walikota manado akhirnya di undurkan sampai pada tahun 2016. Dengan jabatannya sebagai walikota periode 2010-2015 memberikannya akses menjadi orang nomor satu di DPD Demokrat Sulawesi Utara sebab itulah ia dapat merangkai simpul atau jejaring kekuasaan secara luas. Konsep kekuasaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Harold Laswell dalam Budiardjo (2010:84) pada intinya merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku orang yang disebutkan terakhir menjadi sesuai dengan keinginan orang pertama, yang memiliki kekuasaan. Sedangkan jaringan kekuasaan di sini adalah sebagaimana yang dikatakan Budiardjo sebagai domain of power (jangkauan kekuasaan). Yaitu untuk mengenai siapa-siapa saja yang dikuasai oleh pemilik kekuasaan.

Partai Demokrat Kota Manado menggunakan kekuasaan Vicky Lumentut sebagai walikota manado

periode sebelumnya yang memiliki peran penting sebagai “jembatan” untuk mendapatkan perolehan suara dan kekuasaan yang ada di Kota Manado. Secara mikro kekuasaan Vicky Lumentut digunakan untuk mempengaruhi masyarakat secara umum. kekuasaan yang dimaksud adalah sebagaimana yang dimiliki para elite yang ada di Kota Manado. Dari elite ditingkat struktural birokrasi (pemerintah kota, kecamatan, kelurahan bahkan hingga pengurus RT- RW), elite pengusaha, hingga elite di dalam kelompok simaptisan (relawan).

Terkait dengan birokrasi, Vicky Lumentut yang notabene sebagai Incumbent tidak semata-mata memerintahkan kepada semua SKPD di masa ia memimpin sebelumnya untuk kebalik memilih dirinya, namun karena dengan komunikasi yang baik di masa pemerintahannya dengan sendirinya mereka menentukan pilihannya pada kader yang di usung partai demokrat tersebut. Sedangkan kekuasaan dalam elit pengusaha dapat dilihat dari sebagian pengurus partai memiliki latar belakang pengusaha, dan mungkin ada sebagian memegang perusahaan, teorinya pegawai akan mematuhi atau mengikuti apa yang diperintahkan atasannya, sehingga dapat membatu perolehan suara walaupun hanya sedikit. Luas jejaring kekuasaan yang dimanfaatkan Partai Demokrat Kota Manado memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Berbagai kelompok elite lokal yang berhasil dihimpun menjadikannya sebagai penyumbang suara Partai Demokrat yang mampu memenangkan perolehan suara pada pemilihan walikota dan wakil walikota manado tahun 2016.

Dalam kaitan ini, elite sebagaimana yang dikemukakan Pareto (1848-1923)

merupakan sekelompok orang dengan jumlah yang relatif lebih kecil di dalam setiap masyarakat tetapi berkuasa (the ruling class) atas kelompok orang yang lebih besar (rakyat jelata), menurut Pareto dalam SP. Varma (2007: 200-207). Secara umum masyarakat terdiri dari dua kelas, (1) lapisan atas, yaitu elite yang terbagi dalam elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah (non-governing elite), (2) lapisan yang lebih rendah, yaitu non elite. Teori ini kemudian dikembangkan oleh C.Wright Mills dengan menggambarkan struktur kekuasaan yang berlaku di setiap masyarakat ke dalam piramida kekuasaan. Tak terkecuali masyarakat di Kota Manado.

Kesimpulan

Strategi Partai Demokrat pada pemilihan walikota dan walikota di kota Manado meliputi: Pertama, strategi komunikasi terdiri dari (a) jaringan kekuasaan tingkat lokal yaitu menghimpun kekuasaan mayoritas elite lokal di Kota Manado untuk kemudian mengikatnya (baik secara sukarela ataupun melalui tekanan struktural), dengan memanfaatkan pengaruh elite secara luas, baik di struktural birokrasi, pengusaha maupun elite di lingkungan pendukung (relawan) (b) Sosialisasi dengan melakukan pencitraan (figur pasangan calon) dan penguatan jati diri (karakter partai) terhadap masyarakat serta menyampaikan visi dan misi serta program Partai Demokrat; (c) melakukan kampanye tertutup atau kampanye langsung dan kampanye terbuka atau kampanye tidak langsung. Strategi kedua yaitu pencitraan meliputi (a) figur pemimpin yakni Vicky Lumentut sebagai Incumbent dan Ketua DPD Demokrat Sulawesi Utara,

kepiawaiannya membangun citra (sebagai pemimpin yang santun, jujur serta pemurah (benevolent), yang menghegemoni masyarakat di kota Manado (b) citra Partai Demokrat dikenal sebagai partai yang besar, kuat, baik, membela rakyat, dan memiliki komitmen terhadap nasib rakyat kecil, peka terhadap persoalan yang di hadapi masyarakat.

Saran

1. Partai Demokrat diharapkan tidak tergantung dengan figur SBY dan Vicky Lumentut terus-menerus, harus lebih menguatkan mesin partai (kader dan kade partai) dalam pemilu maupun pilkada mendatang
2. Kader Partai Demokrat harus lebih berani untuk memberikan kesempatan dan membuka ruang kepada masyarakat di wilayah tertentu yang terdapat basis partai lain, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat tersebut.
3. Partai Demokrat perlu menyusun program-program baru yang memungkinkan rakyat bisa tertarik kembali dan yang dapat mensejahterakan rakyat seperti program yang dulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus, P. 2006. Mengenal Teori-Teori Politik. Bandung: Nuansa.
- Adrianus, P. 2011. Komunikasi Politik: Komunikator Pesan dan Media. Bandung: Nuansa.
- Amir, P. dan Yasraf. 2004. Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan. Bandung: Jalasutra.
- Anwar. 2004. Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education). Bandung: Alfabeta.

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Budiarjo, M. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza. 2012. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Efriza. 2013. *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Firmansah. 2008. *Mengelola Partai Politik: Persaingan dan Positioning Idiologi Poilitik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmansah. 2012. *Markating Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gaffar, A. 2005. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Junaedi, F. 2013. *Komunikasi Politik: Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nommo. 2011. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, J. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Nursal, A. 2004. *Politik marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Padmo, W. dan Nazaruddin, S. 2008. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Piliang, Y. A. 2005. *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Prihatmoko, J. J. 2005. *Pemilihan Kepala daerah langsung. Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priyono, A. E. dan Usman, H. 2014. *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta : Gramedia.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. 2001. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: SIC.
- Schroder, P. 2010. *Strategi Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Nomos.
- Schumpeter A. J. 2013. *Capitalism, Cosialism, dan Democracy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simon, R. 1999. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Insist Press.
- Susanti. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto. Dan Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pedekatan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- SUMBER LAIN
- <https://beritamanado.com/keberhasilan-kepemimpinan-vicky-ai-problem-dan-tantangannya/>
- <https://pilkada2015.kpu.go.id>
- Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati Dan Wakil Walikota
- Peraturan Pemerintah No 102 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengusulan Dan Pengangkatan, Wakil Gubernur, Wakil Bupati Dan Wakil Walikota
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
- Situs Resmi Partai Demokrat (www.demokrat.or.id)
- Undang- Undang RI No. 1 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 Tentang

Undang-Undang 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No 22 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota

Undang-Undang No. 22 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati
Dan Walikota

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2015

Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang No.1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No.

Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang